



Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Putri Nadiya Puspitasari^{1*}, Maulidah Narastri²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: putrinadiap6@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to measure how influential the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports are on the transparency of financial management at the State Treasury Services Office (KPPN) Surabaya II. The approach used in this research is a quantitative approach by analyzing primary data in the form of questionnaires. Primary data is data collected using the questionnaire method, which means distributing a list of questions (questionnaires) which are filled in and must be answered by employee respondents and Regional Work Units (SKPD) within the scope of KPPN Surabaya II. The population in this study was 178 Regional Work Units (SKPD). The sample used was 64 respondents. The data collection method in this research uses the Likert scale technique.*

Keywords: *Presentation of Financial Reports, Accessibility, Transparency of Financial Management*

Abstrak. Tujuan penelitian ini mengukur seberapa berpengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data primer berupa kuesioner. Data primer adalah data yang dikumpulkan menggunakan metode angket yang artinya menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi dan wajib dijawab oleh responden pegawai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup KPPN Surabaya II. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 178. Sampel yang dipakai sebanyak 64 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik skala likert.

Kata Kunci : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah agar dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau LKPD.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *good governance* dimana dalam sistem negara Indonesia ini mengacu pada pertumbuhan pembangunan, ekonomi,

politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara. Dalam penyelenggara negara tek lepas dari masalah transparansi dalam hal pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara ini menduduki posisi yang strategis dalam suatu proses pembangunan, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian negara.

Dasarnya pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya suatu akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Penyajian informasi keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik dari para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh

Tujuan dari penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik. Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan para pengguna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) supaya untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Penyajian laporan keuangan merupakan yang penting karena dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi, menilai dan memprediksi suatu kinerja instansi pemerintah.

Fenomena pada sektor publik meningkatkan banyak perhatian masyarakat terhadap masalah transparansi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan maka hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Setiap kebijakan pemerintah dituntut transparan agar menciptakan pemerintahan yang bersih dapat mewujudkan demi tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera yang merata bagi

seluruh rakyat. Maka dari itu pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara jujur dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam mengelola dana masyarakat pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu akses kemudahan bagi pengguna untuk mengakses informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Fauziah & Handayani, 2017).

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dan mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor lain yaitu yang menyebabkan meningkatnya dan menjadi pusat perhatian isu transparansi di Indonesia adalah kasus korupsi, hal ini menjadikan Indonesia terkhususnya di pemerintahan menuntut adanya transparansi laporan keuangan yang menjadi salah satu tujuan dari sebuah instansi untuk dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kurniati, Sylvia, & Abdullah , 2024)

Maka dari itu pentingnya transparansi keuangan public di Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan tentang keterbukaan informasi public yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Melalui Undang-undang tersebut dengan berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus terbuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

(Guasmin & Febrianti, 2019) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kota palu. Menyatakan bahwa dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis model regresi linier berganda menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

(R, Maryadi, & Waluyo, 2020) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian, aksesibilitas laporan keuangan Bappeda terhadap transparansi pengelolaan keuangan di kabupaten pinrang. Menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten pinrang dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten pinrang.

Penelitian ini dilakukan oleh (Choirunnisa, 2021) yang membahas tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah kota padangsidempuan yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah kota padangsidempuan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah kota padangsidempuan.

(Siahaan , Falah , & Bharanti , 2018) mengungkapkan pada penelitiannya membahas tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen pimpinan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di kabupaten keerom yang menyatakan bahwa hasil analisis membuktikan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan merupakan alat penting dalam mengukur kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan suatu instansi, termasuk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin krusial di era akuntabilitas publik yang tinggi, dimana pemangku

kepentingan masyarakat menuntut sebuah informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyajian laporan keuangan yang tepat yaitu termasuk format yang jelas dan Bahasa yang mudah dipahami, maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan KPPN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, maka transparansi dalam laporan keuangan menjadi kunci untuk membangun rasa kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik. Disisi lain aksesibilitas laporan keuangan juga berperan penting ketika laporan keuangan mudah diakses melalui platform atau publikasi yang transparan, hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan. Maka dari itu KPPN Surabaya II perlu memastikan bahwa keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang awam mengenai informasi akuntansi.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja suatu organisasi, karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan (Febriana & Narastri, 2023).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2018).

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akuntansi yang akan menjelaskan tentang komponen suatu laporan keuangan, penyajian yang wajar serta konsep akuntansi yang fundamental, kebijakan suatu pengungkapan serta struktur dan konten dari laporan keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan berdasarkan KKPK yaitu sebagai penyedia informasi keuangan untuk para investor Sekarang ini atau investor yang potensial, sebagai pemberian pinjaman kepada para kreditor sebagai pembuatan keputusan penyediaan sumber daya kepada entitas (Rahma, 2023).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesibilitas (*accessibility*) suatu hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut (Hehanusa & Salomi, 2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut (Rochman, 2009) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Menurut UNDP dalam (Mardiasmo, 2019, p. 23) transparansi dibangun atas dasar kebebasan supaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung sehingga mereka yang membutuhkan dapat mengakses informasi tersebut. Diharapkan dengan menerapkan prinsip keterbukaan, pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat lebih diberikan kebebasan untuk secara langsung memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan transparansi adalah atas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah. Keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, tidak memihak, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data primer berupa kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Oleh sebab itu penelitian ini menekankan pada data-data numerik dan dianalisis menggunakan statistik untuk menguji pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan menggunakan metode angket yang artinya menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi dan wajib dijawab oleh responden pegawai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup KPPN Surabaya II. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari jawaban-jawaban atas kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, data yang diperoleh dari kuesioner ini harus diolah kembali. Kuesioner dibagikan melalui salah satu pegawai yang ada di KPPN Surabaya II yaitu yang ada di divisi VERA (Verifikasi Akuntansi) yang bertugas untuk memberikan keyakinan atas dokumen atau laporan yang akan atau telah disajikan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 178. Sampel yang dipakai sebanyak 64 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik skala likert.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian berpengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan, yang artinya semakin baik penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh KPPN Surabaya II terhadap mitra satker maka transparansi pengelolaan keuangan akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Choirunnisa, 2021) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t diketahui bahwa penyajian memperoleh nilai sig $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada

pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila variabel aksesibilitas ditingkatkan maka transparansi akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2018) yang meneliti tentang pengaruh Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan, yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t diketahui bahwa penyajian memperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan pada hasil uji F yang mempunyai nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan hasil uji koefisien determinasi memiliki nilai nilai R square sebesar 0,919. Maka dapat disimpulkan H3 diterima bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Dimana yang sadar akan pentingnya pengaruh dari variabel-variabelnya dengan baik dan transparan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan

keuangan di Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Surabaya II.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Surabaya II.
3. Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) Surabaya II.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah misalnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Efektivitas Laporan Keuangan Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 97-189.
- Amin, A. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar. *E-Jurnal Nobel*.
- Apriana, S. (2020). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada CV Satu Enam Delapan di Tanjung Redeb. *Eprints*.
- Astuti, S., Sembiring, Supitriyanti, Azwar, & Susanti. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Avisha, I., Slamet, B., & Wibowo, S. (2023). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor). *Jurnal Akuntansi Pratama*.

- Choirunnisa. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan. *Repository Universitas Medan Area*.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis laporan realisasi anggaran (LRA) untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 160-173.
- Guasmin, & Febrianti, D. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*.
- Hehanusa, & Salomi, J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *2nd CBAM*, 82-91.
- Kurniati, Sylvia, & Abdullah. (2024). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal*, 15-29.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- R., R. A., Maryadi, & Waluyo, H. S. (2020). Pengaruh penyajian, aksesibilitas laporan keuangan BAPPEDA terhadap transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Pinrang. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 106-117.
- Rahma, L. F. (2023). Penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*.
- Rochman, A. (2009). Pengaruh implementasi sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Siahaan, G. H., Falah, S., & Bharanti, B. E. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen pimpinan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Keerom. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 27-40.